



Laporan Tahunan

2024

PPID

DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kita panjatkan ke Allah SWT, karena berkat rahmat dan ijin-Nya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB untuk tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat yang diterbitkan oleh PPID Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang telah dilaksanakan serta kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, diharapkan masukan, saran dan ide yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas PUPR Provinsi NTB.

Demikian laporan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram, 17 Januari 2025

KETUA PPID DINAS PUPR PROVINSI NTB

Ir. H. Hasim, MT

DAFTAR ISI

COVER	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	4
BAGIAN I GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI	5
1.1 Regulasi	6
1.2 Arah Prioritas Pelayanan.....	6
BAGIAN II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI	7
2.1 Sekretariat Layanan.....	7
2.2 Sumber Daya Manusia	8
2.3 Informasi Publik Pada Sistem Informasi PPID Provinsi NTB.....	8
2.4 Besaran Anggaran	9
BAGIAN III LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	10
BAGIAN IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI.....	12
BAGIAN V KENDALA	12
BAGIAN VI SARAN DAN KESIMPULAN.....	12
6.1 Saran	12
6.2 Kesimpulan.....	12
BAGIAN VII LAMPIRAN	13

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Regulasi	6
Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana PPID Dinas PUPR Provinsi NTB	7
Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia PPID Dinas PUPR Provinsi NTB	8
Tabel 3.1 Rekapitulasi Kunjungan Website dan Download DIP	10
Tabel 3.2 Rekapitulasi Permohonan Informasi Tahun 2022	11
Tabel 7.1 Daftar Permohonan Informasi Tahun 2022	13

BAGIAN I

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI

Transisi demokrasi di Indonesia yang terjadi sejak tahun 1998, telah mengubah paradigma penyelenggaraan negara yang semula tertutup menjadi lebih terbuka serta memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi publik. Salah satu produk regulasi dari paradigma baru tersebut adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP secara tegas memberikan kewajiban kepada badan publik untuk membuka informasi yang berkaitan dengan institusinya, kebijakan yang dihasilkan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan, termasuk kondisi keuangan dan penggunaan anggaran. Dengan kata lain, publik memiliki hak atas informasi dari badan publik.

UU KIP merupakan produk regulasi yang cukup maju dalam mewujudkan keterbukaan penyelenggaraan negara. Praktik penyelenggaraan negara secara terbuka juga kini tengah digiatkan secara global. Salah satu inisiatif internasional yang dibangun untuk mewujudkan keterbukaan informasi adalah Open Governance Partnership (OGP). Sebagai salah satu negara yang telah berkomitmen terhadap inisiatif OGP, Indonesia bertanggungjawab untuk menjalankan berbagai inisiatif untuk mendorong keterbukaan informasi di dalam negeri. Inisiatif tersebut dituangkan dalam rencana strategis Open Government Indonesia (OGI).

Seluruh kegiatan penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi rencana strategis Open Government Indonesia (OGI) berada di bawah koordinasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Salah satu rencana aksi yang telah disusun di tingkat OGI adalah mengoptimalkan implementasi UU KIP yaitu mendorong percepatan pembentukan operasional layanan informasi lingkup Pemda melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Daerah (Pemda) dan perangkatnya.

1.1 Regulasi

Tabel 1.1 Regulasi

No	Regulasi
1	Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
2	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3	Peraturan Komisi informasi No.1 Tahun 2010 Standar Layanan Informasi Publik
4	Permendagri No. 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
5	Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
6	Peraturan Presiden No. 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
7	Surat Keputusan Sekretaris Daerah tentang 1184/ 8/ 2013 tahun 2013 tentang SOP PPID
8	Keputusan Menteri No. 356 tahun 2014 tentang Organisasi Pengelola PPID

1.2 Arah Prioritas Pelayanan

Tugas dan fungsi pelayanan yang menjadi fokus pelaksanaan kegiatan PPID Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB pada tahun 2024 antara lain:

Tugas PPID mengelola, mempublikasikan/mengumumkan, melaksanakan pelayanan informasi publik serta dokumentasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Fungsi PPID: 1. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2. Pengolah, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, 3. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID Provinsi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi, 4. Melaksanakan kewenangan PPID Provinsi yang didelegasikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat

BAGIAN II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

2.1 Sekretariat Layanan

Bertempat di jalan Majapahit nomor 8, gedung Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB, PPID Dinas PUPR melaksanakan kegiatan harian berupa pelayanan informasi kepada masyarakat.

PPID Dinas PUPR memiliki 5 (lima) staf dan 1 (satu) koordinator untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat baik dalam bentuk offline maupun online. Permohonan dan pemberian informasi harus sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

Selain pelayanan dengan cara langsung mendatangi instansi Dinas PUPR (offline), masyarakat juga diberikan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan permohonan informasi melalui sistem elektronik berupa website, facebook maupun instagram (online). Tidak berbeda dengan cara offline, cara online pun harus sesuai prosedur dan petugas PPID membantu mengarahkan masyarakat yang bersangkutan.

Berikut sarana prasarana layanan informasi yang tersedia pada sekretariat layanan, yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana PPID Dinas PUPR Provinsi NTB

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Ketersediaan
1	Sarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	Meja, 2 Kursi, PC, Internet, Buku, Lemari Arsip
2	Sarana Operasional Sekretariat PPID	2 PC, 1 AC, 2 Meja Kursi
3	Sarana Sosialisasi dan Dokumentasi Elektronik	Website, Twitter Facebook, Instagram (Dinas PUPR)

2.2 Sumber Daya Manusia

Secara struktural, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari Atasan PPID, Ketua PPID, Koordinator dan Staf PPID.

Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia PPID Dinas PUPR Provinsi NTB

No	Kedudukan Dalam PPIDP Dinas PUPR Provinsi NTB	Jabatan / Nama	Tempat Tugas	Ket
1	Atasan PPID	Kepala Dinas		
2	Ketua PPID	Sekretaris Dinas		
3	Bidang Pelayanan Informasi			
	Koordinator	Hj. Rohaniah HS, S.E., MM	Sekretariat Dinas	
	Anggota :	1. Nyoman Dian Setiawati, ST	Sekretariat Dinas	
		2. Nur Izzati Rahmatun	Sekretariat Dinas	
4	Bidang Pengelola Informasi			
	Koordinator	Muhsin Arianto, S.T	Bid. Tata Ruang	
	Anggota :	1. Juraedah Dwi Anggraeni, ST, MT	Bid. SDA	
		2. Pajenk Diranksyah	Bid. BANGKIM	
		3. Agil Harnowo Putra, S.T	Bid. Tata Ruang	
		4. Firman Hermawan, S.T	Bid. BIKON	
		5. Pande Made Dewandaru, S.T	Bid. Bina Marga	
		6. Baiq Lusya Agustina, S.T	Bid. Cipta Karya	
5	Bidang Pendokumentasian dan Arsip			
	Koordinator	Khaerus Sobri, ST	Bid. BANGKIM	
	Anggota :	1. Kasi Perencanaan Teknis Jalan	Bid. Bina Marga	
		2. Kasi Perencanaan Teknis SDA	Bid. SDA	
		3. Kasi Perencanaan Tata Ruang	Bid. Tata Ruang	
		4. Kasi Tata Bangunan dan Permukiman	Bid. Cipta Karya	
		5. Kasi Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Bid. BIKON	
		6. Sahdi	Sekretariat Dinas	Humas
		7. Nudzransyah Alif Utama	Sekretariat Dinas	Humas
6	Staf Sekretariat :	1. M. Kausar Ramadhan, S.Kom	Sekretariat Dinas	
		2. Muhammad Mardani	Sekretariat Dinas	Humas
		3. Nawar Basyirah Achmad	Sekretariat Dinas	

2.3 Informasi Publik Pada Sistem Informasi PPID Provinsi NTB

Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Website, FB, IG, TW) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB guna memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan informasi terkait PUPR. Selain itu, dalam website Dinas PUPR juga telah disediakan Daftar Informasi Publik yang bersifat berkala ataupun serta merta yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja oleh masyarakat. Adapun yang bersifat harian, pemohon informasi akan diarahkan mengisi form permohonan informasi dan data diri. Untuk Daftar Informasi Publik Dinas PUPR Provinsi NTB dapat diakses pada link ini: <http://dpu.ntbprov.go.id/web/page/Daftar-Informasi-Publik>

2.4 Besaran Anggaran

Anggaran PPID Dinas PUPR Provinsi NTB tahun 2024 ini sejumlah Rp. 5.256.800, dari total pagu Dinas PUPR Provinsi sebesar Rp. 468.553.819.453,00.

BAGIAN III
LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik dari PPID Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB menerapkan 2 cara, yaitu secara online maupun offline. Online dapat langsung mengirimkan permohonan informasi melalui website, facebook, instagram resmi Dinas PUPR Provinsi NTB. Sedangkan cara offline, masyarakat dapat langsung ke ruang PPID Dinas PUPR Provinsi NTB Unit Kerja Sekretariat.

Tabel 3.1 Rekapitulasi Kunjungan Website dan Download DIP

No	Bulan	Jumlah Kunjungan (Kali)	Jumlah Download DIP (Kali)
1	Januari	92	2
2	Februari	11383	5811
3	Maret	9779	3312
4	April	9415	2830
5	Mei	13287	5211
6	Juni	14845	6806
7	Juli	10279	4773
8	Agustus	2558	2
9	September	2446	2
10	Oktober	1439	2
11	November	1523	2
12	Desember	1634	2
Total		78677	28755

Tabel 3.2 Rekapitulasi Permohonan Informasi Tahun 2024

	PERMOHONAN INFORMASI 2024					
	Bulan	Jumlah Pemohon	Waktu Penyelesaian	Jumlah yang Dikabulkan (Seluruh / Sebagian)	Alasan Penolakan	Ket
	Jan	3	2	2	Diluar Kewenangan	
	Feb	1	1	1		
	Mar	5	3	3		
	Apr	3	2	3		
	Mei	1	1	1		
	Jun	1	1	1		
	Jul	5	2	4		
	Agu	2	1	2		
	Sep	2	1	1		
	Okt	2	1	2		
	Nov	2	1	1		
	Des	3	1	2		

PERMOHONAN INFORMASI 2024									
Bulan	Jumlah Permohonan	Media		Guna		Waktu (hari)	Pemberian Informasi		
		Online	Offline	Individu	Lembaga		Penuh	Sebagian	Ditolak
Jan	3	1	2	1	2	2	2		1
Feb	1		1		1	1	1		
Mar	5	2	3	1	4	3	3		2
Apr	3		3		3	2	3		
Mei	1		1		1	1	1		
Jun	1		1		1	1	1		
Jul	5	2	3	3	2	2	4		1
Agu	2	2		2		1	2		
Sep	2	1	1	1	1	1	1		1
Okt	2	1	1	1	1	1	2		
Nov	2	2		2		1	1		1
Des	3	2	1	3		1	2		1
Total	30	13	16	14	16	0	21	0	7

BAGIAN IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Sepanjang tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB, alhamdulillah tidak pernah ada laporan keberatan ataupun sengketa informasi yang dilewati.

BAGIAN V

KENDALA

Terdapat kendala yang dihadapi oleh PPID Dinas PUPR Provinsi NTB selama 1 tahun adalah:

- a. Masyarakat belum memahami prosedur dalam permohonan informasi

BAGIAN VI

SARAN DAN KESIMPULAN

6.1 Saran

Melihat kendala yang dihadapi ditempat, beberapa saran yang dianjurkan sebagai berikut:

Perlu adanya sosialisasi lebih lanjut terkait mekanisme permohonan informasi yang disampaikan secara langsung kepada pemohon informasi. Dan Kami Dinas PUPR Provinsi NTB, mempermudah mekanisme permohonan data/informasi bagi masyarakat.

6.2 Kesimpulan

Dari uraian yang telah disampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan daftar informasi publik sudah dijalankan dengan baik. Begitu pula dengan pelayanan informasi publik sudah dijalankan dengan baik, baik secara online maupun offline. Meskipun demikian, tetap diperlukan koordinasi yang cepat dan kuat antara PPID Dinas PUPR beserta Bidang / Balai lingkup Dinas PUPR guna mempertahankan dan meningkatkan pelayanan informasi bagi masyarakat.

Mataram, 17 Januari 2025

	Disetujui oleh, Ketua PPID Dinas PUPR Provinsi NTB  <u>Ir. H. Hasim, MT.</u> NIP. 19670322 199603 1 003
--	--

**BAGIAN VII
LAMPIRAN**

Tabel 7.1 Daftar Permohonan Informasi Tahun 2024

No	Tanggal	Keperluan		Identitas Pemohon	Informasi yang Dimohonkan	Guna Informasi	Status		Alasan Penolakan	KET
		Perorangan	Lembaga / Instansi				Diterima	Ditolak		
1	18 Januari 2024		x	Setda Provinsi NTB	Permintaan Dokumen dan laporan AKIP Perangkat Daerah	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan PERMENPAN RB Nomor 88 Tahun 20212.	x			
2	19 Januari 2024		x	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mataram	Permohonan bantuan data dan dokumen dukung renovasi bangunan Gedung pada KPKNL Mataram	Meningkat kondisi dan kualitas bangunan Gedung di lingkungan KPKNL Mataram	x			

3	29 Januari 2024	x		Angeline Ninditha Bulan Kusumaningrum	Data ketersediaan air (debit) terukur harian dalam DAS Meninting, DAS Jangkok, DAS Babak tahun 2002-2022 (baik yang terukur di Pos Duga Air maupun pada Bendung dalam DAS terkait)	Perencanaan		x	Diluar Kewenangan	
4	13 Februari 2024		x	Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara	Permohonan Data	Kajian dan analisis dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara	x			
5	1 Maret 2024		x	Kapolda NTB	Permintaan dokumen rehabilitasi jaringan irigasi D.I Pelasa	Penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi D.I Pelasa	x			
6	1 Maret 2024		x	Kapolda NTB	Permintaan dokumen pekerjaan penanganan Log Segmen Ruas Jalan Wilimasi-Parado	Penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan penanganan Log Segmen Ruas Jalan Wilimasi-Parado	x			

7	7 Maret 2024	x		Garry Virgian	RDTRK KEK Mandalika / Masterplan KEK Mandalika / Zonasi KEK Mandalika	Sebagai data pendukung perizinan untuk tugas akhir perkuliahan arsitektur dengan judul Perancangan Arsitektur Resort di Kawasan KEK Mandalika Lombok.		x	Diluar Kewenangan	
8	8 Maret 2024		x	Ivan Muhammad Hanif	Data curah hujan kabupaten Lombok Barat, DAS Meninting dari tahun 2008-2022	Untuk kepentingan tugas kuliah		x	Diluar Kewenangan	
9	18 Maret 2024		x	Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTB	Permohonan informasi dan data kegiatan pembinaan penyelenggaraan pembangunan bangunan Gedung di Provinsi NTB	Pembinaan dan pemantauan dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan Gedung Negara	x			
10	02/04/2024		x	Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mataram	Permohonan Data	Melakukan uji penerapan standar serta penilaian performa standar bagi pelaku usaha	x			

11	15/04/2024		x	BKKBN NTB	Permohonan Data Program/kegiatan variable Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Penilaian program pembangunan keluarga di kabupaten/kota melalui iBangga Award	x			
12	25/04/2024		x	Setda Provinsi NTB	Permohonan data jama'ah calon Haji ASN lingkup Pemprov NTB 1445 H/2024 M	Permohonan data terkait nama-nama ASN jama'ah calon Haji yang akan melaksanakan Haji Tahun 2024	x			
13	8 Mei 2024	x		Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri (a.n Lissli Rizki Kantari)	Permohonan izin pengumpulan data sekunder	Analisis kualitas air irigasi dengan pengaplikasian alat Biofilter berdasarkan sifat kimia dan fisik	x			
14	28 Juni 2024	x		Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram (a.n Paul Julian Alfanda)	Permohonan Data	Penyusunan Tugas Mata Kuliah/Tugas Akhir (Skripsi) Jurusan Teknik Sipil – Kajian Lapis Ulang pada Jalan Dato Kedaro, Desa Lembar, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat	x			
15	13 Juli 2024	x		Deby Saragustinur	pembuatan KRK	Untuk membuat PBG		x	Diluar Kewenangan	

16	24 Juli 2024		x	Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Provinsi NTB	Permohonan Informasi Publik	Melaksanakan kajian kredibilitas anggaran sektor air minum, sanitasi, dan persampahan di Provinsi NTB	x			
17	25 Juli 2024	x		Fakultas Teknik Universitas Mataram (a.n Rizma Izza Gesti Wulandari)	Permohonan Data	Penyusunan Tugas Mata Kuliah/Tugas Akhir (Skripsi) Jurusan Teknik Sipil – Model SWAT untuk Analisis Hidrologi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Padolo, Kota Bima	x			
18	25 Juli 2024	x		Fakultas Teknik Universitas Mataram (a.n Rezvon Fitriany)	Permohonan Data	Penyusunan Tugas Mata Kuliah/Tugas Akhir (Skripsi) Jurusan Teknik Sipil – Analisis Hidrologi menggunakan Model Hidrologi SWAT di Daerah Aliran Sungai (DAS) Hidirasa Kab. Bima	x			

19	27 Juli 2024		x	Ramli	Program/Kegiatan sektor WASH yang menjadi kewenangan Dinas PU-PR beserta lokasi kegiatan, serta anggaran dan realisasinya untuk Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023	Analisis Kredibilitas Anggaran Sektor WASH (penyediaan air minum, sanitasi dan kebersihan) di Kawasan Pesisir	x			
20	8 Agustus 2024	x		Budi Prasetyo	Laporan Tahunan 2021 s.d 2022	Pembuatan laporan FS	x			
21	9 Agustus 2024	x		Budi Prasetyo	Pagu Kegiatan SPAM di Dinas PUPR Prov NTB untuk tahun 2024	Untuk keperluan FS	x			
22	06/09/2024		x	Asisten Deputi Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi	Permohonan Data	Mendukung penguatan mitigasi risiko bencana di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika serta menindaklanjuti kunjungan lapangan dalam rangka Kajian Valuasi Ekonomi Kebencanaan di NTB	x			

23	12/09/2024	x		Nova Awalia Ramdani	Jumlah Panjang Jalan Menurut Kondisi Per Kabupaten dan Kota di NTB Dari Tahun 2013-2023 (Jumlah Kondisi Baik, Rusak Sedang, Rusak Ringan dan Rusak Berat masing masing kabupaten dan kota yang ada di NTB)	Sebagai Bahan Untuk Penelitian Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram		x	Diluar Kewenangan	
24	9 Oktober 2024		x	Roend Eko Prastyoningrom	terkait kontak dan informasi Unit Pengujian Material bahan dan Bangunan PUPR NTB	Rencana Pengujian Material dan Bangunan di wilayah Mataram	x			
25	28 Oktober 2024		x	BPS Provinsi NTB	Permintaan Data Panjang Jalan Provinsi NTB Tahun 2023	Penyusunan Publikasi Statistik Transportasi 2024	x			
26	14/11/2024	x		Gregorius ony goleng	Permohonan Data Realisasi dan Dokumentasi Kegiatan Pekerjaan fisik di Wilayah Kab.Dompu dan Kab.Bima pada Sub Bidang Pengembangan Permukiman Tahun Anggaran 2023	Perbandingan pembangunan dan perkembangan wilayah permukiman antar wilayah di NTB	x			
27	21/11/2024	x		Khairunnisa	Data Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota Mataram khususnya Sungai Ancar dan data	Tujuan penggunaan untuk data penunjang tesis.		x	Diluar Kewenangan	

					debit air sungai di Kota Mataram.					
28	10 Desember 2024	x		Ewan Sastrawan	Data proyek Renovasi Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat berupa rancangan Anggaran Biaya Pekerjaan. (excel)Time Schedule Pelaksanaan Proyek (Excel)Tahapan dan Durasi pekerjaan (Laporan mingguan/bulanan)	sebagai data penelitian untuk menyelesaikan study S1 "Study Evaluasi dan Strategi Pengendalian Proyek Pembangunan Gedung"	x			
29	19 Desember 2024	x		Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram (a.n Riki Martin)	Permohonan Data Sketsa Lokasi, Panjang Ruas Jalan TGH. Faesal, Kota Mataram	Penyusunan Tugas Mata Kuliah/Tugas Akhir (Skripsi) Jurusan Teknik Sipil – Analisa Tingkat kerusakan Jalan pada Perkerasan Lentur menurut Metode PCL	x			
30	25 Desember 2024	x		Alidin	Data Kematapan Jalan Kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Barat	AcuanRencana Pendampingan PIP - DAU kelanjutan Rapat PIP di Senggigi 28 November 2024 oleh DJPK Kemenkeu		x	Diluar Kewenangan	